

REFERENSI

- 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 2007, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, diakses 14 Februari 2016, <<https://staff.blog.ui.ac.id/.../Permendagri-Nomor-64-T...>>.
- 2014a, Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI.
- 2014b, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 2014c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 2014, Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.
- 2014, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- 2014, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- 2014, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- 2014, Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah.
- 2014, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.



- 2014, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 2015, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- 2015, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adam, B, Mussari, R & Jones, R 2011, 'The Diversity of Accrual Policies in Local Government Financial Reporting: an Examination of Infrastructure, Art and Heritage Assets in Germany, Italy and the UK', *Financial Accountability and Management*, vol. 27, no. 2.

Adventana, GA & Kurniawan, CH 2014, 'Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Menurut PP No. 71 Tahun 2010', Universitas Atma Jaya, diakses 18 Februari 2016, <<http://ejournal.uajy.ac.id/id/eprint/5612/>>.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN n.d., *Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Indonesia*, diakses 14 April 2016, <<http://www.dpr.go.id>>.

BPK RI 2014, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*, diakses 15 April 2016, <<http://www.bpk.go.id/ihps>>.

– 2015, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*, diakses 22 April 2016, <<http://www.bpk.go.id/ihps>>.

Carlin, TM 2005, 'Debating The Impact of Accrual Accounting and Reporting in The Public Sector', *Financial Accountability and Management*, vol. 21, no. 3.

Chan, JL 2003, 'Government Accounting: An Assessment of Theory, Purposes, and Standards', vol. 23, no. 1, hal. 13–20.

Christiaens, JR 2003, 'Accrual Accounting Reforms in Belgian Local Governments: a Comparative Examination', *Journal of Public Budgeting, Accounting, & Financial Management*, vol. 15, no. 1, hal. 92–109.

Connolly, C & Hyndman, N 2006, 'The Actual Implementation of Accrual Accounting: Caveats from a Case within the UK Public Sector', *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, vol. 19, no. 2, hal. 272–290.



- Creswell, JW 2014a, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- 2014b, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage, California.
- Guthrie, J 1998, 'Application of Accrual Accounting in The Australian Public Sector - Rhetoric or Reality?', *Financial Accountability and Management*, vol. 14, no. 1.
- Gutomo, K n.d., Berburu Opini WTP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, diakses 22 Maret 2016, <<http://www.bpkp.go.id/%20jateng/konten/1910/Berburu-Opini-WTP.bpkp>>.
- Halim, A & Kusufi, NS 2013, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Hennink, M, Hutter, I & Bailey, A 2010, *Qualitative Research Methods*, Sage.
- Hermawan, RT 2015, 'Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Tetap', tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- International Federation of Accountants 2003, *Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second Edition)*, diakses 15 April 2016, <<http://www.ifac.org>>.
- Jorge, SM, Carvalho, JB da C & Fernandes, MJ 2007, 'Governmental Accounting in Portugal: Why Accrual Basis is a Problem', *Journal of Public Budgeting, Accounting, & Financial Management*, vol. 19, no. 4, hal. 411–444.
- Lye, J, Perera, H & Rahman, A 2005, 'The Evolution of Accruals-Based Crown (Government) Financial Statements in New Zealand', *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, vol. 18, no. 6, hal. 784–815.
- Mahadi, R, Noordin, R, Mail, R & Sariman, K 2014, 'Accrual Accounting in Malaysia: What We Should Learn from Others', *Malaysian Journal of Business and Economics*, vol. 1, no. 2, hal. 63–76.
- Mardiasmo 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Molland, A & Clift, R 2008, 'Has the Management of Infrastructure Assets (IAs) Improved with the Use of the Accrual Method in Local Government?', *Asian Review of Accounting*, vol. 16, no. 2, hal. 97–108.



- Paulsson, G 2006, 'Accrual Accounting in The Public Sector: Experiences from The Central Government in Sweden', *Financial Accountability and Management*, vol. 22, no. 1.
- Pollanen, R & Loiselle-Lapointe, K 2012, 'Accounting Reform in the Government of Canada: Exploratory Evidence on Accrual Accounting Adoption and Impact', *Financial Accountability and Management*, vol. 28, no. 4, hal. 359–377.
- Purwanto, W 2015, 'Kajian Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemda DIY', Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ratmono, D & Sholihin, M 2015, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Edisi Pertama*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Ritonga, IT 2010, *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah, Yogyakarta.
- Ritonga, IT 2015, *Lessons Learned from Early Implementation Stage of Accrual Accounting in Indonesia Local Government: A Case Study in Province XYZ*, diakses 14 April 2016, <<http://repository.ugm.ac.id>>.
- Saleh, Z & Pendlebury, MW 2006, 'Accrual Accounting in Government: Developments in Malaysia', vol. 12, no. 4, hal. 421–435.
- Sargiacomo, M & Gomes, D 2011, 'Accounting and Accountability in Local Government: Contributions from Accounting History Research', *Sage*, vol. 16, no. 3, diakses 11 Februari 2016, <ach.sagepub.com>.
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Suwardjono 2005, *Teori Akuntansi: Perekrayasaan Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga*, BPFE, Yogyakarta.
- Tenovici, CO 2013, 'The Evaluation Subsequent to the Recognition of Fixed Tangible Assets for Public Institutions: Methods Based on Cost', *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, vol. 3, hal. 23–31.
- Yin, RK 2014, *Case Study Research: Design and Methods, Edisi Kelima*, Sage, California.